

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, industri keuangan yang berkembang pesat tidaklah cukup jika tidak disertai dengan akses keuangan yang memadai bagi masyarakat luas (Kustika 2018, Cheng dan Degryse 2010).

Akses terhadap produk dan layanan keuangan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern. Ketersediaan akses tersebut memungkinkan individu atau organisasi untuk melakukan beragam transaksi keuangan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Dengan terbukanya akses terhadap jasa keuangan maka dapat diharapkan bahwa masyarakat akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan mereka, misalnya melalui pinjaman kredit untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, kurangnya akses terhadap jasa keuangan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi yang lambat, hal ini dikaitkan dengan keterbatasan lingkungan yang memungkinkan untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih baik (Allen et al. 2012).

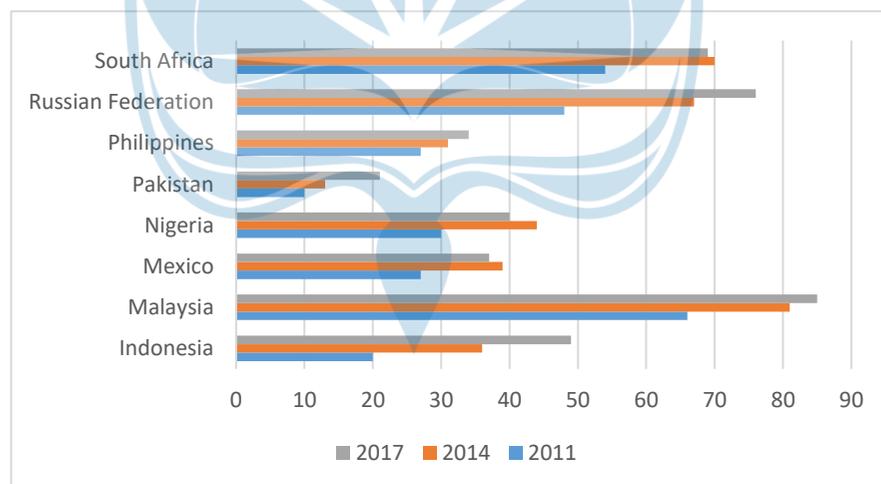
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan, sehingga sektor keuangan menjadi sangat penting. Pembangunan sektor keuangan bisa dilihat dari

seberapa terbukanya akses untuk memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan atau yang biasa disebut Inklusi Keuangan dan ketimpangan di Indonesia bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya Gini Ratio di wilayah tersebut. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan di sektor keuangan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Beck et al. 2007; Shahbaz dan Islam 2011; Ang 2010) dan mengurangi kemiskinan (Jalilian dan Kirkpatrick 2002). Beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa akses ke keuangan penting dalam menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan (Wan dan Zhou 2004; Bae, Han dan Sohn 2012).

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendorong sistem keuangan yang inklusif bagi semua dan pertumbuhan ekonomi seperti tampak dari dimunculkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNIK) pada tahun 2012. SNIK menempatkan sektor keuangan sebagai jangkar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. SNIK tersebut kemudian direvisi pada tahun 2015 agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) 2015–2019. Dalam SNIK, visi utama dari strategi keuangan inklusif ini adalah mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya ini dapat dikatakan sebagai inisiatif yang berhasil. Menurut *Global Financial Inclusion Index* (Findex) 2017 yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2018, inklusi keuangan Indonesia telah membuat kemajuan paling pesat di kawasan Asia Timur dan Pasifik (Gambar 1.1). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi

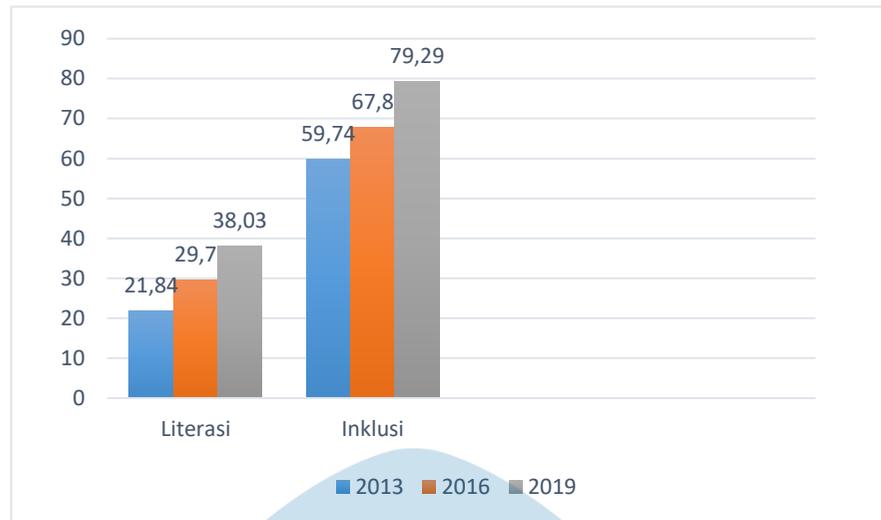
Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2013 sampai 2019 juga menunjukkan adanya perbaikan baik pada Indeks Inklusi Keuangan (IKK) maupun Indeks Literasi Keuangan (ILK) (Gambar 1.2). Dalam periode 2013 sampai 2019 terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33 persen dari 21,84 persen di tahun 2013 menjadi 38,03 persen di tahun 2019, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39 persen, dari 59,74 persen di tahun 2013 menjadi 76,19 persen di tahun 2019. Dari grafik ini tampak bahwa literasi keuangan masih jauh lebih rendah daripada indeks inklusi keuangan. Artinya tingginya akses ke produk dan layanan jasa keuangan masih disertai dengan pemahaman keuangan yang relatif rendah.



Sumber: World Global Findex Database (2017), (Diolah).

Gambar 1. 1

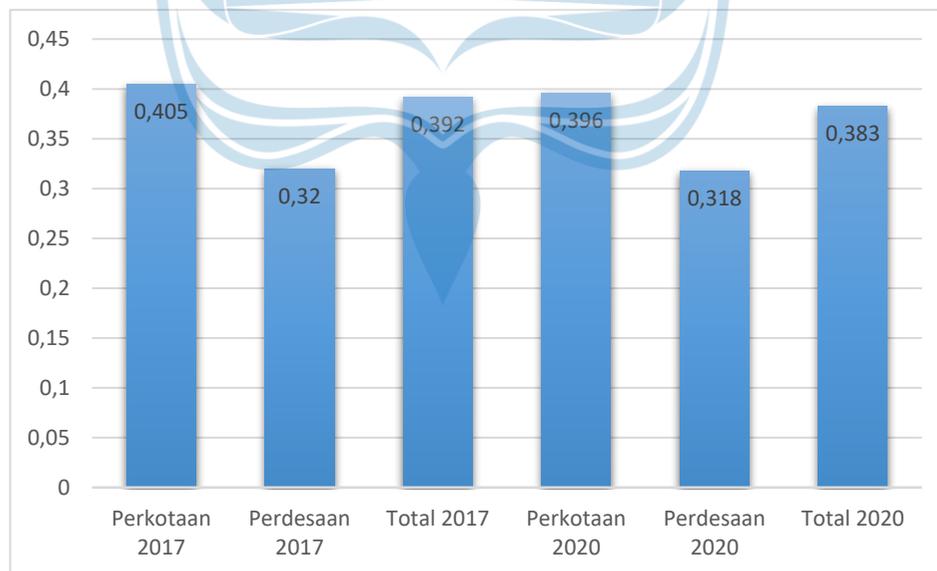
Perkembangan Inklusi Keuangan di Beberapa Negara Tahun 2011, 2014 dan 2017



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019). (Diolah).

Gambar 1. 2

Pertumbuhan Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2013, 2016 dan 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) dan (2020). (Diolah).

Gambar 1. 3

Rata-rata Gini Ratio Indonesia Maret dan September tahun 2017 dan 2020

Adapun ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan tabel di atas, total gini ratio Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 0,383, angka ini menurun sebesar 0,009 jika dibandingkan dengan total gini ratio tahun 2017 yang sebesar 0,392. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Indonesia, yang dihitung dengan menggunakan data pengeluaran, pada tahun 2020 masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Penelitian tentang hubungan antara inklusi keuangan dan distribusi pendapatan di Indonesia masih relatif jarang dilakukan. Afifah dan Efri (2019) melakukan penelitian dengan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2017 dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini karena dimensi penetrasi atau kepemilikan rekening masyarakat miskin yang rendah, dimensi ketersediaan layanan jasa keuangan di Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa maupun daerah perkotaan, padahal penduduk miskin banyak di perdesaan, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, dan bunga kredit perbankan di Indonesia yang tinggi. Sedangkan Ummah et al. (2015) menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Sejalan dengan hasil dari penelitian Umah et al pada tahun 2015, Kusuma dan Indrajaya (2020) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi

Bali, hasil dari penelitian tersebut adalah inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri perbankan di Provinsi Bali yang masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan.

Dari penelitian di atas memberikan indikasi bahwa inklusi keuangan di Indonesia memiliki pengaruh yang lemah terhadap distribusi pendapatan. Namun demikian dengan semakin kuatnya upaya mendorong inklusi keuangan di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di atas, hubungan antara IIK dan distribusi pendapatan menjadi penting untuk terus diperhatikan termasuk di level provinsi yang memang masih sangat jarang dilakukan. Tersedianya data IIK pada level provinsi yang bisa diakses dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) membuka peluang untuk meneliti hal ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadikan peran inklusi keuangan menjadi sangat penting terkait keterbatasan mobilitas yang disebabkan oleh pandemi tersebut. Oleh karena ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Inklusi Keuangan dan Distribusi Pendapatan: Studi Antar Provinsi Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Distribusi Pendapatan di level provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di level provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi untuk memberi masukan atau memberikan regulasi terkait kasus-kasus yang sama dikemudian hari.
2. Peneliti/Pembaca, sebagai bahan referensi, pembanding, dan memperkuat studi/penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

1.5 Hipotesis Penelitian:

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Inklusi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia.
2. Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab akan dijelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat yang diperoleh dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung analisa dari penelitian yang dibuat oleh peneliti akan dijelaskan pada bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengerjakan penelitian, alat analisis yang digunakan, dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, dan untuk mencari hasil dan jawaban dalam analisa penelitian dijelaskan pada bab ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian dengan metode dan alat analisis yang digunakan. Di bab ini diperoleh jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil dari hasil analisis atau intisari dari jawaban atas perumusan masalah yang dipaparkan.

Daftar Pustaka

Lampiran